BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai Negara yang sebagian besar ditempati oleh mayoritas masyarakat muslim di harapkan sebagai salah satu negara yang menggerakan ekonomi syariah. Irfan Syauqi Beik, kepala pusat studi bisnis dan ekonomi syariah IPB dalam satu kesempatan menyamapaikan LKMS ini di yakini bisa mendorong peningkatan ekonomi dimasyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2016 saat ini pertumbuhan ekonomi syariah dalam sektor keuangan dan ditambah dengan perbankkan syariah menjadi 5%, perbankkan syariah yang dimaksud didalamnya termasuk lembaga keuangan mikro syariah (Zuraya Nidia, Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bisa Tingkatkan Ekonomi Masayarakat Miskin, Republika.co.id, 2016, diakses pada Selasa 26 Desember 2016 jam 8.32 WIB). Lembaga Keuangan mikro syariah sendiri mengutamakan pelayanan jasa yang dilakukan melalui beberapa cara seperti pemberian pinjaman ataupun pembiayaan dalam suatu usaha mikro kepada nasabah dari lembaga keuangan tersebut. Jasa yang diberikan selain pembiayaan yaitu adanya pemberdayaan yang diberikan bagi para anggota sebagai bentuk pengembangan usaha yang tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan semata (Baskara, 2013).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini terdiri dari beberapa lembaga pertama, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana-dana Zakat, Infak, Sadaqah, Waqaf dan hibah tanpa mengambil keuntungan didalamnya. Kedua Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam lembaga ini masih menggunakan sistem konvesional akan tetapi seperti akad-akadnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Terakhir yaitu koperasi syariah yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat untuk menghimpun data menggunakan azas-azas yaitu kerjasama, keseimbangan dan keadilan (Dede Al-Fatih, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), http://alfatihmedia.blogspot.co.id, diakses Sabtu 24 Desember 2016 jam 6.13 WIB.) Lembaga keuangan mikro syariah dianggap mampu mengatasi permasalahan masyarakat muslim dalam susahnya untuk mengakses lembaga keuangan yang ada selama ini, karena LKMS diangggap sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat menengah kebawah dan dengan akses yang baik maka dirasa menjadi suatu lembaga yang tepat (Hardi, 2013).

Disisi lain dengan perkembangan lembaga mikro syariah yang semakin baik angka kemiskinan saat ini masih cukup tinggi, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta dari masing-masing kecamatan yang ada di DIY angka kemiskinan sebagai berikut : Kabupaten Gunung Kidul 22,47%, Kulon Progo 17,73 %, Sleman 15 %, Bantul 14,64% dan Yogyakarta 9,15 % (http://Yogyakarta.bps.go.id, 2015). Selain itu juli 2016 Sri Adiningsih (Wantimpres) menuturkan mengutip dari data pada BPS 2016 angka kemiskinan keseluruhan DIY 13,20% angka ini lebih besar dari presentase

total angka kemiskinan nasional yaitu 11,13% (economic.okezone.com). Dilihat dari hasil peresentase kemiskinan di DIY masih terdapat masyarakat miskin di Provinsi ini, seperti diketahui DIY salah satu Daerah yang sangat menarik dan banyak diminati oleh para wisatawan, selain itu banyak berdiri ukm-ukm di DIY akan tetapi masih banyak masyarakat miskin di DIY. Adanya permasalahan kemiskinan yang terjadi dan adanya sebagian masyarakat yang dapat dikatakan dalam golongan kaya, maka hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dimasyarakat yang seharusnya adanya usaha dari setiap individu/ masyarakat yang melakukan pergerakan mobilitas sosial.

Adanya ketimpangan sosial yang terjadi sebagai manusia sudah kodratnya menjadi makhluk sosial untuk hidup bermasyarakat apabila masih adanya ketimpangan sosial yang terjadi. Seharusnya masyarakat strata bawah dapat terdorong untuk meningkatkan taraf hidup mereka untuk menaikan strata yang lebih tinggi. Perubahan strata tersebutlah yang disebut dengan mobilitas sosial (Wahyuni, 2015). Pergerakan Mobilitas Sosial dapat dilakukan oleh individu itu sendiri maupun dorongan dari saluran-saluran tertentu seperti lembaga sosial, ekonomi, pendidikan, dan keuangan, salah satunya Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diharapkan menjadi wadah untuk penghimpunan dana masyarakat menengah kebawah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti pada BMT dan BPRS sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki akses dengan masyarakat menengah kebawah dan merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang

sedang mengalami perkembangan yang baik diharapkan dapat menjadi pendorong pergerakan Mobilitas Sosial di masyarakat. Mendorong pergerakan Mobilitas yang dimaksud pada BMT dan BPRS salah satunya dapat dilakukan melalui pembiayaan. Selain itu kegiatan tanggung jawab yang dilakukan perusahaan maupun lembaga keuangan syariah. Hal ini mereka harus memiliki kesadaran atas hal tersebut karena merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan akan menjadi satu hal positif pula untuk lembaga tersebut dimasa depan (Erwanda, 2012).

Apabila kedua hal tersebut yaitu pembiayaan dan tanggung jawab sosial diberikan tepat pada sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mereka, serta dilakukan dalam jangka waktu panjang akan lebih bermanfaat dalam mendorong Mobilitas Sosial di masyarakat. Namun, pada saat ini belum banyak diketahui peran dari pembiayaan dan tanggung jawab sosial yang dilakukan baik BMT maupun BPRS ini apakah diberikan sesuai dengan sasaran yaitu masyarakat menengah kebawah dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Apabila dalam lembaga keuangan mikro syariah tersebut diberikan pembiayaan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang memang membutuhkan baik segi modal maupun pendampingan atau pemberdayaan dengan dilakukan pengawasan, serta evaluasi hal ini harusnya dapat membantu mendorong pergerakan mobilitas sosial dimasyarakat.

Pergerakan mobilitas sosial dimasyarakat dapat didorong melalui tingkat tanggung jawab sosial juga yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro

syariah, tanggung jawab sosial yang dilakukan perlu adanya pelaporan tanggung jawab sosial karena hal ini sebagai bentuk tanggung jawab BMT dan BPRS sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang dengan baik untuk melaporkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Malli, Casson, dan Napier (2006) menyatakan dalam suatu pelaporan sosial dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap suatu hubungan yang dalam, Islam sebagai suatu hubungan persaudaraan dengan orang lain dan suatu bentuk keadilan dengan orang lain, serta dalam bank islam sebagai bentuk kepatuhan syariah.

Pelaporan Tanggung Jawab Sosial yang didalamnya sudah terdapat item-item berbasis syariah yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR), akan tetapi ISR masih bersifat sukarela dan masih minim perusahaan maupun lembaga keuangan syariah yang sudah menggunakan pelaporan ISR. Hal ini tentunya menjadi satu masalah yang harus diatasi oleh perusahaan maupun lembaga keuangan berbasis syariah, karena sebagai organisasi yang berbasis syariah harus melaporkan maupun menjalankan segala kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian berkaitan dengan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan tentang pelaporan ISR sudah pernah dilakukan pada penelitian yag pernah dilakukan sebelumnya pada lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian Yusuf (2014) yang menunjukan pada peran BMT dalam peningkatan ekonomi rakyat saat ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan BMT dengan segala upaya

yang telah dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mikro yang lemah telah berhasil dipenuhi. Penelitian yang dilakukan Erwanda (2015) mengenai tanggung jawab sosial dan pelaporannya hasil menunjukan pelaporan hanya sebatas pada bidang pendidikan. Melihat dari penelitian sebelumnya yang menunjukan hasil yang positif dari adanya pelaporan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah mikro, maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana kegiatan pembiayaan dan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh 2 lembaga syariah mikro yang berbeda yaitu pada BMT dan BPRS dapat mempengaruhi atau tidak tingkat mobilitas sosial dimasyarakat saat ini. Peneliti melakukan fokus penelitian pada lembaga keuangan syariah mikro pada Baitul Maal Wa-Tamwil Bringharjo dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga.

Dari Uraian diatas maka diturunkan judul yaitu, "**EVALUASI PERAN LEMBAGA SYARIAH MIKRO DALAM MENDORONG PERGERAKAN MOBILITAS SOSIAL DAN PENERAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* (ISR)" (Studi Komparasi Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ihsanul Fikri dan Bank Perkreditan Rakyat Bangun Drajat Warga Di Yogyakarta).**

B. Batasan Masalah dan Ruang Lingkup

Penelitian ini akan mengevaluasi peran lembaga keuangan mikro syariah dan pelaporan pembiayaan serta kegiatan sosial sesuai dengan indeks ISR di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Batasan Penelitian ini yaitu kegiatan

pembiayaan dan kegiatan sosial dalam mendorong pergerakan mobilitas sosial dan penerapan Islamic Social Reporting (ISR) di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Ruang lingkup penelitian ini ada 2 lembaga keungan mikro syariah BMT dan BPRS di wilayah Yogyakarta yaitu Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ihsanul Fikri dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan BMT BIF dan BPRS BDW?
2. Bagaimana bentuk kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan BMT BIF dan BPRS BDW?
3. Bagaimana bentuk pelaporan tanggung jawab sosial di BMT BIF dan BPRS BDW?
4. Bagaimana peran BMT BIF dan BPRS BDW dalam mendorong pergerakan mobilitas sosial?
5. Bagaimana Tingkat Kesesuaian Pelaporan dengan Indeks Islamic Social Reporting pada BMT BIF dan BPRS BDW ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk dan pelaksanan pembiayaan yang dilakukan BMT BIF dan BPRS BDW.
2. Untuk mengetahui bentuk kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan BMT BIF dan BPRS BDW.
3. Untuk mengetahui bentuk pelaporan tanggung jawab sosial di BMT BIF dan BPRS BDW.

4. Untuk mengetahui peran BMT BIF dan BPRS BDW dalam mendorong pergerakan mobilitas sosial.
5. Untuk mengetahui Tingkat Kesesuaian Pelaporan dengan indeks Islamic Social Reporting pada BMT BIF dan BPRS BDW.

E. Manfaat Penelitian

1) Bidang Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana pembiayaan dan pelaksaan pembiayaan dilakukan dan mengetahui bentuk tanggung jawab sosial, serta peran dari pembiayaan dan tanggung jawab sosial dalam membantu masyarakat melalui 2 hal tersebut. Selain itu dari hasil penelitin ini dapat dijadikan pengetahuan baru mengenai pelaporan baik pembiayaannya maupun tanggung jawab sosialnya apakah sudah memenuhi indeks Islamic Social Reporting (ISR). Bagi BMT BIF dan BPRS BDW dapat digunakan sebagai masukan terutama dalam bidang pelaporan yang memenuhi indeks ISR sebagai lembaga keuangan syariah. Sebagai salah satu masukan juga bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tujuan yang sama.

2) Bidang Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman para praktisi baik bidang ekonomi syariah maupun akuntansi syariah yang akan mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah.